

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Association of Southeast Asian Nations atau yang lebih dikenal dengan ASEAN merupakan salah satu organisasi internasional regional yang menjadi wadah kerjasama antara 10 negara di kawasan Asia Tenggara (Jakarta, n.d.). ASEAN bermula dari adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Ada rasa senasib dan sepejuangan antar negara-negara pendiri ASEAN yang mendorong mereka membentuk ASEAN. Para anggota ASEAN bersepakat untuk menciptakan suatu wilayah yang damai dengan adanya kerjasama antar negara anggota, dengan harapan bahwa masing-masing negara dapat mencapai kesejahteraan. Lalu seiring berjalannya waktu, tujuan ASEAN semakin berkembang dan merambah pada bidang politik dan ekonomi, dengan harapan bahwa masing-masing negara dapat mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, aspek politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang menjadi 3 (tiga) pilar ASEAN harus berjalan bersamaan (Eta, n.d.).

Ketika terjadi suatu permasalahan baik hukum, ekonomi, sosial, dan politik dalam kawasan Asia Tenggara, organisasi ASEAN selalu berupaya untuk ikut menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti saat ini contohnya ketika dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang menyebabkan permasalahan di berbagai sektor kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya ikut terdampak oleh pandemi Covid-19 (Fernandes, 2020). Dan sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. Pandemi Covid-19 telah menghambat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali kawasan Asia Tenggara sejak awal tahun 2020 (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat hingga kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja. Penyebaran virus corona yang cepat dan mudah menginfeksi membuat pemerintah dengan sigap membuat kebijakan yang mengakibatkan aktivitas perekonomian menjadi terhambat dan perekonomian negara menjadi turun.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi hanya dalam waktu singkat di tahun 2020. *The ASEAN Comprehensive Recovery Framework* menyatakan bahwa pada tahun 2020, ekonomi ASEAN diproyeksi berkontraksi sebesar 3,8% yang merupakan kontraksi ekonomi pertama dalam 22 tahun. Volume perdagangan barang global diperkirakan menurun sebesar 9,2%, aliran masuk modal asing (*foreign direct investment*) global diperkirakan turun 40%, perdagangan turun 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Selama pandemi negara-

negara di kawasan Asia Tenggara banyak yang mengalami kondisi resesi. Ini dibuktikan dengan penurunan pendapatan perkapita masing-masing negara di Asia Tenggara dimana *Gross Domestic Product* (GDP) ASEAN menyentuh angka -3,4% pada tahun 2020. Padahal di tahun 2019, pertumbuhan GDP kawasan Asia Tenggara mencapai 4,4%. Namun demikian, tahun 2020 juga ditandai dengan menguatnya solidaritas ASEAN untuk keluar dari keterpurukan resesi dan juga pemulihan perekonomian di kawasan dari dampak pandemi. Pentingnya peran ASEAN saat ini sebagai organisasi yang mewadahi kerjasama antar negara anggotanya terhadap negara-negara anggota dalam upaya pemulihan perekonomian regional yang terjadi.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini yang lebih menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi digital, maka transformasi digital merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindari. Fenomena ini dimulai dari kemunculan internet dan integrasi sistem yang menghubungkan manusia dengan mesin (Trisyanti & Prasetyo, 2018). Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat membuat semua proses aktivitas manusia berbasis digital. Proses atau kegiatan yang biasanya dilakukan secara fisik berkurang drastis. Selain itu, adanya perubahan nilai pada transaksi perdagangan menuju transaksi perdagangan online karena adanya kebijakan *lockdown* dan *social distancing* yang diterapkan oleh seluruh negara di dunia (Indriya, 2020). Hal ini dilihat ASEAN sebagai peluang digitalisasi yang muncul di tengah pandemi Covid-19. Tekanan untuk beralih ke media digital agar proses atau kegiatan dapat tetap berjalan sekaligus upaya pemulihan ekonomi ini semakin meningkat. ASEAN telah menyerukan berbagai dukungan sebagai upaya pemanfaatan transformasi digital.

Kawasan ASEAN memiliki potensi digital yang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan populasi internet di Asia Tenggara tumbuh cepat hingga menyentuh angka 400 juta pengguna (Kemp, 2021). Adopsi digital secara luas di semua aspek kehidupan membawa ASEAN menempati peringkat ketiga penetrasi selular regional di dunia dengan 132 persen pengguna. Semakin banyak bisnis dilakukan secara online di kawasan, ekonomi digital ASEAN diperkirakan bernilai lebih 300 miliar US Dollar pada tahun 2025 mendatang (Ministry of Trade and Industry Singapore, n.d.). Perkembangan ekonomi digital di ASEAN semakin pesat ketika kawasan telah menjadi lebih terhubung secara digital, bisnis, dan konsumen sama-sama dapat memperoleh manfaat dari peningkatan akses ke produk dan layanan digital. Dengan transformasi digital yang sedang berlangsung di ASEAN, kawasan ini akan menjadi pemain utama dalam ekonomi digital global, yang menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan dan inovasi.

Pandemi Covid-19 telah mempercepat laju digitalisasi di kawasan ASEAN. Peningkatan laju digitalisasi di kawasan ini dan meningkatnya keinginan untuk akses yang berarti dan penggunaan teknologi digital oleh warga negara ASEAN harus diimbangi dengan komitmen yang kuat dan visi

politik yang diperlukan untuk memenuhi harapan tersebut. Oleh karena itu, memanfaatkan transformasi digital yang sedang berlangsung di kawasan ini diperlukan untuk mengkatalisasi agenda integrasi ekonomi digital ASEAN. Namun pada kenyataannya, laju digitalisasi yang meningkat juga memberikan tantangan. Pertama, banyak jenis usaha dan pekerjaan tradisional, yang belum mengadopsi digital, terpaksa tutup. Sekitar 56 persen pekerjaan di lima negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi.¹ Selain itu, kesenjangan digital di negara ASEAN juga dipandang masih sangat besar. Penetrasi internet sebagai infrastruktur utama ekonomi digital belum merata di seluruh negara ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan dari kesebelas negara anggota ASEAN hanya tiga negara yang memiliki tingkat penetrasi internet di atas 80 persen.²

Pandemi yang sedang berlangsung mengedepankan kebutuhan untuk megartikulasikan strategi transformasi digital yang kohesif untuk ASEAN serta. Hal ini penting untuk membantu kawasan pulih dari dampak ekonomi COVID-19 dan membangun fondasi yang tangguh untuk pertumbuhan ekonomi digital kawasan menuju Ekonomi Digital ASEAN, di mana arus barang, jasa, dan data yang lancar dan aman didukung dengan memungkinkan aturan, regulasi, infrastruktur, dan bakat. Dengan kata lain, strategi transformasi digital yang koheren untuk ASEAN tidak hanya penting untuk pemulihan kawasan tetapi juga untuk daya saing jangka panjangnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya ASEAN dalam memanfaatkan transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi regional pasca pandemi Covid-19 dan integrasi ekonomi digital?

C. Kerangka Berpikir

1. Teori Organisasi Internasional

Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr., organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala (Fabiana Meijon Fadul, 2019). Organisasi internasional merupakan suatu perhimpunan negara-negara yang terstruktur yang

¹ Kominfo: "Presiden: ASEAN Harus Tumbuh Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Digital" 14 November 2020, diakses pada 23 Juni 2023 08.10 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30786/presiden-asean-harus-tumbuh-jadi-kekuatan-besar-ekonomi-digital/0/berita>

² Kominfo: "Presiden: ASEAN Harus Tumbuh Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Digital" 14 November 2020, diakses pada 23 Juni 2023 08.10 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30786/presiden-asean-harus-tumbuh-jadi-kekuatan-besar-ekonomi-digital/0/berita>

berlandaskan suatu perjanjian dalam rangka kerjasama untuk mencapai kesejahteraan, memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul. Organisasi internasional diklasifikasikan ke dalam banyak jenis berdasarkan karakteristik dan ranah cakupan organisasi didalamnya. Menurut lembaga-lembaga internasional yang ada, terdapat dua kategori lembaga internasional yang utama, yaitu *International Governmental Organizations* (IGOs) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) (Ferdinanduscredo99, 2019).

Organisasi internasional memiliki beberapa peran yang bisa dijalankan baik ditingkat internasional, negara, maupun individu (Sugito, 2016). Secara general organisasi internasional berperan sebagai sarana melakukan kerjasama bagi anggotanya dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Organisasi internasional juga berperan sebagai saluran komunikasi kepada para anggotanya untuk mengantisipasi agar akomodasi bisa digunakan. Selain itu, organisasi internasional juga dapat berperan sebagai forum penyelesaian masalah yang terjadi di antara negara anggotanya (Bennett, 1995).

Organisasi internasional merupakan bagian dari kerangka kerjasama internasional yang lebih luas, yang meliputi perjanjian, konvensi, hukum internasional, dan berbagai bentuk rezim internasional (Barth, 2017). Melalui organisasi internasional, aktor-aktor negara menciptakan hubungan kerjasama yang didasari oleh struktur yang jelas dan lengkap serta disahkan secara hukum tanpa paksaan maupun kekerasan. Kerjasama dalam situasi institusional berlangsung secara formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambil keputusan yang umum.

ASEAN (*Association of Southeast Asia Nations*) merupakan salah satu klasifikasi IGO dalam ranah regional yang menjadi wadah kerjasama antara 11 negara di kawasan Asia Tenggara yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailand, dan Timor Leste. Para anggota ASEAN bersepakat untuk menciptakan suatu wilayah yang damai dengan adanya kerjasama antar negara anggota, dengan harapan bahwa masing-masing negara dapat mencapai kesejahteraan. Kesadaran dan keyakiyanaan akan perlunya memperkuat hubungan solidaritas regional dan kerjasama untuk mendirikan dasar yang kuat bagi tindakan bersama, untuk memajukan kerjasama regional dalam semangat persamaan dan kemitraan, maka didirikan organisasi ASEAN (Eta, n.d.).

Untuk menunjang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, diperlukan suatu hubungan kerjasama yang erat diantara negara anggota. Sesuai dengan tujuan pembentukannya, ASEAN telah berkomitmen untuk menjadi wadah kerjasama negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan akibat dari isu-isu internasional yang sedang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai agenda, forum diskusi, serta perjanjian yang ada di dalam organisasi kerjasama regional tersebut. Kemudian untuk pembuatan keputusan ASEAN dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan negara anggota ASEAN yang merujuk pada kerangka kerja hukum dan kelembagaan ASEAN (Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2011).

Adapun salah satu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam merespon isu global yang terjadi saat ini adalah percepatan pemulihan ekonomi regional dengan integrasi ekonomi digital yang berupa agenda Transformasi Digital ASEAN. Mengingat disrupsi dan pergeseran adopsi teknologi di kawasan akibat Covid-19, ASEAN harus segera mengambil langkah pasti agar transformasi digital memberikan manfaat yang adil bagi semua negara anggota ASEAN. Hal ini penting untuk membantu daerah pulih dari dampak ekonomi Covid-19 dan membangun fondasi yang tangguh untuk pertumbuhan ekonomi digital kawasan menuju Ekonomi Digital ASEAN. Dengan kata lain, agenda transformasi digital yang koheren untuk ASEAN tidak hanya penting untuk pemulihan kawasan tetapi juga untuk daya saing jangka panjangnya (ASEAN, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, teori organisasi internasional digunakan sebagai dasar dari suatu bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara dalam mencapai kepentingan bersama. Selain itu, dengan adanya teori ini nantinya bentuk kerjasama yang terjalin dalam suatu organisasi internasional akan memberikan manfaat dan solusi atas permasalahan yang dapat mensejahterakan negara anggotanya secara terstruktur dan efisien.

2. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, prosedur pembuat keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional. Prinsip merupakan keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan keyakinan. Norma merupakan standar perilaku yang didefinisikan ke dalam hak dan kewajiban. Aturan merupakan bentuk-bentuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan secara spesifik. Prosedur pembuat keputusan merupakan praktik yang

berlaku dalam membuat dan mengimplementasikan pilihan bersama. Rezim internasional ini sejak awal telah dikonseptualisasikan sebagai variable intervensi yang berdiri di antara faktor-faktor yang akan mempengaruhi hasil dan perilaku negara (Krasner, 1982).

Rezim internasional terbagi ke dalam tiga macam basic causal variables yang menjelaskan perilaku state actor dalam meratifikasi perjanjian di dalam sebuah institusi.

1. *Egoistic self-interest* (kepentingan pribadi egoistik)

Keberadaan rezim internasional sering dianggap sebagai kepentingan pribadi yang egois, dimana segala bentuk tindakan di dalam rezim ini ditunggangi dengan keinginan aktor untuk memaksimalkan fungsi utilitas yang mereka punya. Kepentingan pribadi egoistik dikaitkan sebagai faktor penentu rezim. Terdapat tiga cara untuk membentuk sebuah rezim, pertama, sebuah spontanitas rezim muncul dari harapan individu yang bersatu terhadap banyak tindakan individu. kedua, rezim terbentuk karena dinegoisasikan karena persetujuan yang jelas. Ketiga, terdapat kasus dimana rezim dipaksakan kepada aktor karena beban atau gangguan eksternal.

2. *Political power* (kekuatan politik)

Variable jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu power digunakan untuk menjamin hasil yang optimal dalam sebuah sistem serta power didorong untuk memaksimalkan kepentingan individu di dalam sistem, khususnya pada negara hegemon yang mempunyai kekuatan besar yang akan mengikat rezim internasional.

3. *Norms & principles*

Norma dan prinsip dianggap sebagai penjelasan dalam pembentukan, kekuatan, dan pembubaran rezim namun tidak secara langsung mempengaruhi isu yang sedang terjadi.

4. *Habit and custom*

Variable ini digunakan hanya sebagai pendukung ketiga variable sebelumnya dalam pembentukan rezim internasional. Kebiasaan mengacu pada pola perilaku yang berdasarkan praktik yang sering dilakukan. Pola perilaku pada awalnya dihasilkan oleh pertimbangan kekuasaan, yang berujung menimbulkan ekspektasi bersama.

5. *Knowledge* (pengetahuan)

Pengetahuan menciptakan dasar untuk melakukan kerja sama dengan memperjelas interkoneksi yang kompleks yang belum dipahami oleh aktor.

Pengetahuan juga berfungsi sebagai instrument dalam meningkatkan perilaku konvergen negara, serta berperan melampaui garis-garis ideologi yang berlaku (Krasner, 1982).

Dalam bukunya, Krasner menjelaskan terdapat tiga pendekatan mengenai rezim internasional, yaitu conventional structural, modified structuralism, dan Groatian.

1) Pendekatan Conventional Structuralism

Susan Strange memandang bahwa rezim internasional merupakan sesuatu yang tidak memiliki dampak besar dalam hubungan internasional karena mengaburkan kepentingan dan hubungan kekuasaan yang merupakan penyebab langsung perilaku dalam sistem internasional. Pada pendekatan ini, pengaruh realisme berada pada posisi skeptis terhadap signifikansi rezim dalam mempengaruhi perilaku negara. Orientasi dari pendekatan ini mengkonseptualisasikan dunia atau sistem, yang ditentukan oleh kepentingan; kekuasaan; dan interaksi, bagi aktor rasional yang mementingkan diri sendiri.

2) Pendekatan Modified Structuralism

Robert Keohane dan Arthur Stein memandang rezim internasional berasal dari kesepakatan sukarela antar aktor terhadap suatu perjanjian untuk mencapai kepentingannya. Pendekatan ini memiliki asumsi, bahwa dalam sistem internasional yang terdiri dari negara berdaulat, rezim berfungsi untuk mengkoordinasikan perilaku dan tindakan negara dalam mencapai hasil yang diharapkan pada area isu tertentu.

3) Pendekatan Groatian

Raymond Hopkins, Donald Puchala, dan Oran Young memandang rezim sebagai fenomena yang terdapat di seluruh sistem politik bahkan pada sistem yang anarki sekalipun. Pendekatan ini melawan dua bentuk pendekatan lainnya yang mengatakan bahwa sistem internasional hanya terdiri dari negara-negara berdaulat melainkan terdapat aktor lain, baik aktor negara maupun aktor non-negara (Krasner, 1982).

Berdasarkan penjelasan di atas, teori rezim internasional digunakan sebagai dasar dari perilaku negara anggota ASEAN dalam meratifikasi berbagai kebijakan konvensi digital ASEAN sebagai anggota masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community/AEC*) merupakan sebuah rezim khusus di dalam region ASEAN yang berfokus di bidang ekonomi dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika

pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan (Ramdhan, 2020). MEA dibentuk pada pertemuan KTT ASEAN ke-9 tahun 2003 yang kemudian resmi didirikan pada akhir tahun 2015.

Upaya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN di era transformasi digital ini dibuktikan melalui ratifikasi Perjanjian tentang Perdagangan Elektronik (*ASEAN Agreement on Electronic Commerce/AAEC*) oleh seluruh negara anggota ASEAN yang juga merupakan bagian dari AEC. Kontribusi perjanjian ini sangat penting dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas, mengurangi hambatan masuk dan biaya operasional usaha secara signifikan, serta memaksimalkan manfaat dari integrasi ekonomi regional. Dalam melakukan ratifikasi terhadap AAEC, seluruh negara anggota ASEAN dapat dikatakan telah terikat akan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berada di dalam MEA sebagai rezim internasional.

Pertimbangan akan kepentingan nasional dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang dikedepankan negara anggota ASEAN pada forum diinterpretasikan ke dalam perilaku aktor negara dalam meratifikasi sebuah perjanjian. Integrasi ekonomi regional merupakan dasar utama dari harapan negara anggota ASEAN yang bersatu dalam meratifikasi perjanjian AAEC. Melihat potensi dari ekonomi digital ASEAN yang menghasilkan peluang bagi bisnis dan masyarakat, seluruh negara anggota ASEAN menyepakati ratifikasi perjanjian tentang Perdagangan Elektronik. Tujuan dari perjanjian AAEC ini adalah untuk mempromosikan e-commerce termasuk di dalamnya membentuk kerangka peraturan yang koheren untuk e-commerce di ASEAN. Yang pada akhirnya negara-negara ASEAN mulai menyepakati untuk meratifikasi perjanjian tentang Perdagangan Elektronik. Perjanjian tentang perdagangan elektronik menjadi pengetahuan baru yang kemudian dijadikan sebuah pedoman dan acuan oleh negara anggota ASEAN dalam rencana kerja implementasi perjanjian tentang perdagangan elektronik.

Melalui pendekatan Modified Structuralism, kesepakatan negara anggota ASEAN sebagai kelompok Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam meratifikasi perjanjian AAEC muncul atas kerja sama mereka untuk mendukung keberlanjutan integrasi ekonomi kawasan

3. Konsep Transformasi Digital

Menurut Muhamad Danuri (2019), transformasi digital adalah sebuah perubahan cara penanganan sebuah pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas. Perubahan ini menerapkan teknologi digital dalam

semua aspek kehidupan masyarakat seperti pendidikan dengan *e-learning* nya, bisnis dengan *e-bisnis*, perbankan dengan *e-banking*, pemerintah dengan *e-government*, perdagangan dengan *e-commerce*, dan masih banyak lagi yang lain (Jamaludin et al., 2022).

Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mendorong ekonomi yang kian terintegrasi dan efisien. Transformasi ekonomi digital mengubah konektivitas dan nilai antara pelaku bisnis dengan konsumen. Transformasi bisnis dari yang semula komunikasi satu arah dimana perusahaan harus menyiarkan pesan dan mengirimkan produk langsung ke konsumen sebagai bentuk promosi kini menjadi hubungan dua arah dengan penggunaan platform media digital sebagai strategi pemasaran. Transformasi ekonomi digital juga membuka cakupan pasar menjadi lebih luas. Dalam bisnis tradisional, cakupan pasar hanya berada pada satu regional saja, namun sekarang aktivitas ekonomi telah mencakup banyak negara dalam sebuah rantai perdagangan internasional (Wibowo, 2022).

Saat ini telah banyak berkembang inovasi-inovasi yang mendukung transformasi ekonomi digital. Proses transaksi seperti penjualan, pembelian, lelang, pembayaran, dan pemesanan sekarang dilakukan dengan sarana digital seperti *e-banking*, sms-banking, internet banking, hingga *e-money*. Kemudian aktivitas yang ikut bertransformasi ke era digital seperti *e-learning*, *e-ticket*, *e-auction*, *e-library*, *e-payment*, ojek online, dan masih banyak lagi. Transformasi digital telah membawa perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, mengubah sistem yang terjadi di seluruh dunia (Jamaludin et al., 2022).

D. Argumen

ASEAN berupaya mengatasi permasalahan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui strategi percepatan Transformasi Digital Inklusif dan pengimplementasian inisiatif *Bandar Seri Begawan Roadmap*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Menurut Nasution, pendekatan kualitatif

nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, penulis mengumpulkan data deskriptif yang relevan dengan topik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari data pustaka. Penulis juga menggunakan studi dokumentasi dari berbagai literatur berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, koran, kliping, dan hasil penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga metode, sebagai berikut:

1. Metode pereduksian data, merupakan proses merangkum, memilih hal pokok, serta memfokuskan data pada hal-hal penting yang relevan dengan rumusan masalah.
2. Metode penyajian data, yaitu penyusunan informasi-informasi yang telah didapatkan yang memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan.
3. Metode penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir penulisan di mana kesimpulan yang didapatkan bersifat kualitatif dalam bentuk pernyataan.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana ASEAN memanfaatkan perkembangan transformasi digital saat ini sebagai strategi pemulihan ekonomi regional pasca pandemi Covid-19 dan integrasi ekonomi digital.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Tahun 2020 merupakan tahun terjadinya penurunan GDP kawasan Asia Tenggara akibat pandemi Covid-19 dan tahun 2022 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena sampai saat ini pandemi masih belum usai dan agenda percepatan pemulihan ekonomi ASEAN serta integrasi ekonomi digital juga masih berlanjut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini diuraikan secara sistematis yang terbagi ke dalam 4 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

BAB II Covid-19 dan Kondisi Ekonomi Negara Anggota ASEAN

BAB III Upaya ASEAN Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Agenda Transformasi Digital

BAB IV Kesimpulan